

**PENGUATAN PERAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN
DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
**(Studi Penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana
Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Daerah)**

Nancy Fransisca M. Simanjuntak¹, Muhadam Labolo² & Yudi Rusfianda³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana Magister Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
Correspondence Author: fransiscanancy4@gmail.com

ABSTRACT

The evaluation of the National Road Safety Plan (RUNK) for the period 2011-2035 highlighted weaknesses in institutional functions and roles, prompting the Government to issue Presidential Regulation (Perpres) 1 of 2022 regarding the National Road Safety Plan for the period 2021-2040. The Ministry of Home Affairs, through the Directorate General of Regional Development, plays a key role in traffic and transportation management. This research focuses on strengthening the role of the Directorate General of Regional Development in implementing Perpres at the regional level, emphasizing coordination between the central and regional governments, civil society organizations, the transportation industry, and transportation communities to enhance traffic safety. A qualitative descriptive research method was used to gain a deep understanding of the context, processes, and meanings behind the Directorate General's role in policy implementation. In-depth interviews will be conducted to collect data from various stakeholders, while participatory observation will be carried out to directly observe policy implementation. The results of the research indicate that the Directorate General of Regional Development at the Ministry of Home Affairs plays a vital role in improving traffic safety in Indonesia. They have successfully strengthened coordination between the central and regional governments, civil society organizations, the transportation industry, and transportation communities. Through initiatives such as the Road Traffic and Transportation Safety Action Plan (RAK LLAJ) and traffic safety management information systems, the Directorate General has helped identify and address policy gaps and enhance human resource quality in regions.

Keyword: *Road Traffic, Concurrent Authority, Role of Ditjen Bina Bangda*

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu bagian dari susunan organisasi di Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Berdasarkan Permendagri No. 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas utama menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memiliki kewenangan yang meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, pemberian bimbingan teknis, administrasi, dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan

Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran dan keselarasan pembangunan daerah di seluruh Indonesia, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang pasal 1 angka 31). Keamanan dan keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Isu utama terkait keselamatan transportasi jalan adalah masih tingginya tingkat fatalitas akibat kejadian kecelakaan, masih relatif tingginya angka kematian serta korban luka berat akibat kecelakaan yang berdampak terhadap kerugian ekonomi yang besar dan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang pasal 1 angka 31). Keamanan dan keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Isu utama terkait keselamatan transportasi jalan adalah masih tingginya tingkat fatalitas akibat kejadian kecelakaan, masih relatif tingginya angka kematian serta korban luka berat akibat kecelakaan yang berdampak terhadap kerugian ekonomi yang besar dan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Apabila dilihat dari jenisnya, kecelakaan yang paling banyak terjadi adalah; tabrakan antar bagian depan kendaraan (22%), tabrakan bagian depan dengan belakang kendaraan (22%), serta kecelakaan tunggal (20%). Sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas memiliki latar belakang pendidikan SMA/ sederajat, dengan proporsi mencapai 71%. Sementara korban kecelakaan tamatan SMP hanya 14%, tamatan SD 10%, dan lulusan kuliah 5% (Lakalantas Polri, 2022). Oleh karena itu, upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan mengurangi jumlah korban harus menjadi prioritas bagi pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam sistem transportasi. Upaya-upaya tersebut dapat meliputi peningkatan infrastruktur jalan, penegakan regulasi yang lebih ketat, kampanye kesadaran publik, dan pelatihan yang lebih baik bagi pengemudi. Dengan cara ini, dapat diharapkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi dan masyarakat dapat merasa lebih aman saat berkendara. Tingginya angka kecelakaan di daerah merupakan permasalahan serius yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Untuk melaksanakan program - program RUNK LLAJ, dibutuhkan kelembagaan yang kuat serta koordinasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan Keselamatan LLAJ yang meliputi lintas sektor dan lintas wilayah serta mampu berkolaborasi dengan badan usaha dan masyarakat. Ruang lingkup koordinasi yang dibutuhkan meliputi pemangku kepentingan di tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dalam penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) diatur agar pihak yang terkait bertanggung jawab untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dalam meningkatkan keselamatan melalui perbaikan sistem berkeselamatan, kendaraan berkeselamatan, pengguna yang berkeselamatan, jalan berkeselamatan, dan penanganan korban kecelakaan.

Dalam menghadapi permasalahan ini, Ditjen Bina Bangda memastikan bahwa keselamatan dan keamanan transportasi menjadi prioritas di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, rencana aksi keselamatan menjadi bagian yang sangat penting dalam kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri memiliki konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja.

Dalam konteks keselamatan lalu lintas, kebijakan publik dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) memiliki peran krusial dalam menganalisis dan mengatasi masalah keselamatan lalu lintas. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa masalah keselamatan lalu lintas dapat ditangani secara efektif dan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki potensi untuk memperbarui pengetahuan dan literatur dalam bidang keselamatan lalu lintas. Dengan mempelajari peran Ditjen Bina Bangda dalam penyelenggaraan rencana aksi keselamatan, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan mengisi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. Hal ini akan membantu memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana peran Ditjen Bina Bangda dalam penerapan kebijakan dan instrumen keselamatan dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas di daerah.

Selanjutnya selain *implementation gap* dan *knowledge gap*, peneliti juga melihat *Theoretical gap* (kesenjangan teoritis): *Theoretical gap* terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara teori yang digunakan dalam penelitian dengan fakta atau hasil penelitian yang didapatkan. Kesenjangan ini biasanya terjadi ketika ada kekurangan dalam teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Pemerintah memiliki peran fundamental dalam mengatur, memelihara, dan mengelola tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Peran ini menuntut pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi esensial dalam memberikan perlindungan, menegakkan hukum, menyusun kebijakan, serta menyediakan pelayanan publik yang merata bagi seluruh warga negara. Sebagai entitas yang memiliki otoritas penuh, pemerintah menjalankan fungsi regulatif untuk menciptakan aturan-aturan yang menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan di dalam masyarakat.

Dalam konteks kelembagaan, peran pemerintah menempati posisi sentral sebagai entitas yang memegang kendali atas kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam suatu sistem. Kelembagaan pemerintah mencakup berbagai badan, lembaga, dan cabang-cabang yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi khusus dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintah dalam konteks kelembagaan juga memiliki fungsi utama untuk menyusun aturan main, mengatur, serta mengelola tata kelola suatu negara. Fungsi ini dilaksanakan melalui badan-badan khusus seperti parlemen, kabinet, departemen atau kementerian, dan badan eksekutif lainnya. Setiap lembaga ini memiliki peran spesifik dalam pembuatan kebijakan, pengaturan kehidupan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya negara.

Selain mengatur dan memastikan keberlangsungan sistem, pemerintah juga bertugas untuk memberikan pelayanan publik. Ini mencakup segala aspek, mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan hingga infrastruktur dan transportasi yang merata. Melalui lembaga-lembaga khusus seperti kementerian kesehatan, pendidikan, dan public works, pemerintah berperan dalam penyediaan dan pengelolaan layanan-layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam struktur kelembagaan, pemerintah juga berperan dalam menjaga keseimbangan dan memastikan koordinasi antara cabang-cabang pemerintah. Fungsi pengawasan dan pembatasan kekuasaan yang berlebihan juga merupakan bagian integral dari peran kelembagaan pemerintah. Ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga agar setiap cabang pemerintah dapat bekerja secara efektif dan seimbang.

Pemerintah sebagai lembaga juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup adanya transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks kelembagaan, peran

pemerintah melampaui hanya sekadar menjalankan kekuasaan, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Peran pemerintah dapat dibagi menjadi dua aspek yang berbeda namun saling terkait: peran normatif dan peran inisiatif. 1) Peran Normatif Pemerintah: Peran normatif pemerintah berkaitan dengan fungsi untuk menetapkan dan menjalankan aturan serta standar yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Pemerintah berperan dalam menegakkan hukum, membuat peraturan, dan menjalankan regulasi yang mengikat bagi semua warga negara. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan, penetapan undang-undang, serta peraturan-peraturan yang memastikan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum dalam suatu negara. Pada tingkat normatif, pemerintah berfungsi sebagai penegak aturan yang menetapkan standar moral, etika, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat; 2) Peran Inisiatif Pemerintah: Di sisi lain, peran inisiatif pemerintah mengacu pada kemampuan dan tanggung jawab pemerintah dalam memulai, mendorong, dan mengelola berbagai program, kebijakan, dan proyek untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup beragam bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan hidup. Pemerintah memiliki peran utama dalam memulai langkah-langkah strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Melalui inisiatif ini, pemerintah dapat merumuskan rencana pembangunan, mengelola sumber daya, dan memfasilitasi inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kesetaraan akses, serta kesejahteraan sosial.

Kedua peran ini saling melengkapi, peran normatif menentukan kerangka kerja dan standar bagi perilaku masyarakat, sementara peran inisiatif memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang proaktif dan produktif dalam mendorong pembangunan dan kemajuan. Kesenambungan antara kedua peran ini penting dalam menjaga keseimbangan dalam kebijakan dan tindakan pemerintah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah, peran Ditjen Bina Bangda tergolong dalam peran inisiatif pemerintah. Ditjen Bina Bangda, yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki peran yang proaktif dalam menginisiasi, mengembangkan, dan mendukung implementasi program-program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat daerah.

Peran inisiatif Ditjen Bina Bangda terlihat dalam upayanya untuk merumuskan kebijakan, memberikan arahan teknis, serta memfasilitasi kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan keselamatan lalu lintas. Ditjen Bina Bangda memegang peran penting dalam menyusun pedoman, menyediakan bimbingan, dan mengkoordinasikan upaya-upaya di tingkat daerah guna memperbaiki sistem transportasi serta meningkatkan keselamatan para pengguna jalan.

Lebih jauh lagi, Ditjen Bina Bangda berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi para pejabat daerah dalam hal keselamatan lalu lintas. Mereka juga terlibat dalam menyusun rencana aksi, mengkoordinasikan program-program pelatihan, serta mendukung implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat lokal.

Peran inisiatif Ditjen Bina Bangda dalam konteks ini menunjukkan tanggung jawabnya dalam mengawal, mendorong, dan menginisiasi upaya-upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran, keamanan, dan perbaikan infrastruktur lalu lintas di tingkat daerah. Dengan demikian, Ditjen Bina Bangda memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah

serta mendorong langkah-langkah yang mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih aman dan efisien di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk memahami peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks, proses, dan makna di balik peran Direktorat Jenderal dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode wawancara mendalam akan digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan terkait, sedangkan observasi partisipatif akan dilakukan untuk mengamati langsung pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini akan menggali isu-isu terkait peran dirjen bangda dalam implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas di daerah, dengan fokus pada peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Isu-isu yang dikaji meliputi kesenjangan antara kebijakan yang telah dibuat dan implementasinya di lapangan, kurangnya perhatian terhadap keselamatan di daerah, minimnya pemahaman tentang safety plan dan kajian tentang keselamatan LLAJ, serta kurangnya alokasi anggaran bidang perhubungan di daerah. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan keselamatan lalu lintas di daerah dan untuk memahami peran Direktorat Jenderal dalam mengatasi masalah tersebut.

Dengan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan kebijakan keselamatan lalu lintas di daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi yang berguna bagi pihak terkait dalam memperkuat peran Direktorat Jenderal dan meningkatkan implementasi kebijakan tersebut, sehingga dapat mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.

PEMBAHASAN

Ditjen Bina Bangda memainkan peran krusial dalam memastikan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam konteks perencanaan pembangunan. Melalui integrasi program-program pembangunan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Ditjen Bina Bangda memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan yang komprehensif dan terpadu, mencakup sektor perhubungan sebagai salah satu prioritas utama. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang diadakan secara rutin setiap tahun merupakan forum penting untuk menyelaraskan indikator-indikator pelayanan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk memastikan alokasi anggaran yang adekuat dari pemerintah daerah terhadap program-program keselamatan lalu lintas. Inisiatif ini krusial untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat. Peran Ditjen Bina Bangda dalam mendukung peraturan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah untuk mencapai tujuan keselamatan lalu lintas.

Pertama, cabang dengan label "Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022" (warna merah muda) menekankan pentingnya penyelenggaraan peraturan di tingkat daerah. Cabang ini menunjukkan bahwa Ditjen Bina Bangda memiliki peran dalam meningkatkan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan melalui regulasi yang mengikat. Selain itu, ini menunjukkan bahwa regulasi menjadi dasar bagi upaya keselamatan yang efektif.

Kedua, cabang "Peran utama Ditjen Bina Bangda" (warna biru) menyoroti koordinasi dan evaluasi sebagai peran inti Ditjen Bina Bangda. Ditjen Bina Bangda berperan dalam melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap peraturan dan kebijakan keselamatan di tingkat daerah. Cabang ini juga mencakup pemberian bimbingan teknis serta pendampingan dalam implementasi kebijakan.

Ketiga, cabang "Peran dalam Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" (warna hijau) menegaskan peran Ditjen Bina Bangda dalam mengkoordinasikan program keselamatan di tingkat daerah dan menyusun strategi untuk keselamatan lalu lintas. Cabang ini juga menekankan pentingnya menyelaraskan rencana aksi keselamatan di tingkat daerah dengan regulasi nasional.

Terakhir, cabang "Sinergi dengan pemerintah daerah" (warna jingga) dan "Evaluasi dan penyesuaian kebijakan" (warna kuning) menunjukkan pentingnya kerja sama antara Ditjen Bina Bangda dan pemerintah daerah. Sinergi antara kedua pihak ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung program keselamatan transportasi. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan memungkinkan Ditjen Bina Bangda mengidentifikasi dan mengatasi masalah, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah berjalan sesuai dengan tujuan keselamatan lalu lintas.

a. Identifikasi Peran Inisiatif

Peran inisiatif dalam pengembangan dan implementasi kebijakan publik, termasuk dalam konteks Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) terhadap Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, adalah kunci untuk mendorong inovasi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Inisiatif ini mewakili langkah proaktif dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi yang kreatif, dan mengimplementasikan strategi untuk mengatasi tantangan pembangunan daerah dan keselamatan lalu lintas. Dengan mengambil inisiatif, Ditjen Bina Bangda dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan aspek keselamatan lalu lintas ke dalam perencanaan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung secara efektif dan efisien, menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dari perspektif Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bina Bangda), peran inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas menjadi aspek kritis dalam mencapai tujuan keselamatan lalu lintas nasional. Pengembangan aplikasi mobile untuk pelaporan kecelakaan merupakan contoh inovasi teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya peningkatan keselamatan lalu lintas. Inisiatif seperti ini tidak hanya mempermudah proses pelaporan tetapi juga membantu pihak berwenang dalam mengumpulkan data yang akurat dan real-time, yang sangat penting untuk analisis dan perbaikan kebijakan keselamatan lalu lintas.

Program edukasi masyarakat tentang keselamatan berkendara juga merupakan langkah penting dalam mengubah perilaku pengguna jalan. Dengan menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kepatuhan

terhadap aturan lalu lintas dan praktik berkendara yang aman. Edukasi yang efektif dapat mengurangi angka kecelakaan dan menyelamatkan nyawa, menunjukkan peran vital pemerintah daerah dalam mempromosikan keselamatan lalu lintas dari tingkat akar rumput.

Selain itu, pembangunan infrastruktur lalu lintas yang lebih aman, seperti peningkatan pencahayaan jalan, pembuatan jalur pejalan kaki, dan pemasangan rambu-rambu keselamatan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pengguna jalan. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi potensi kecelakaan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan aksesibilitas yang lebih baik dan lingkungan yang nyaman untuk beraktivitas.

Dari pandangan Dirjen Bina Bangda, kreativitas dan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan inisiatif-inisiatif tersebut mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat mereka. Ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk masalah keselamatan lalu lintas.

Dari perspektif seorang staf di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda), kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui pengembangan aplikasi keselamatan lalu lintas, program edukasi masyarakat, dan peningkatan infrastruktur menunjukkan langkah-langkah progresif yang signifikan. Inisiatif seperti pengembangan aplikasi keselamatan lalu lintas tidak hanya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya-upaya keselamatan tetapi juga memudahkan pengumpulan data dan feedback yang dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Sebagai staf Bina Bangda, saya mengakui bahwa teknologi memainkan peran kunci dalam menciptakan sistem lalu lintas yang responsif dan interaktif.

Program edukasi masyarakat tentang keselamatan berkendara merupakan fondasi yang kuat untuk membangun kesadaran dan mengubah perilaku berkendara di kalangan masyarakat. Dari sudut pandang staf Bina Bangda, upaya ini esensial untuk memastikan bahwa informasi penting tentang keselamatan lalu lintas menjangkau berbagai segmen masyarakat secara efektif. Kami berupaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program edukatif yang inovatif dan menarik, yang dapat meresonansi dengan masyarakat luas, termasuk kelompok usia yang beragam.

Peningkatan infrastruktur lalu lintas merupakan aspek lain yang kami dukung secara intensif. Sebagai bagian dari tim Bina Bangda, saya menyadari pentingnya memiliki infrastruktur yang aman dan sesuai standar untuk mengurangi risiko kecelakaan. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi area blackspot yang rawan kecelakaan, yang memerlukan perhatian dan peningkatan yaitu area penerangan jalan yang lebih baik, pembangunan trotoar dan jalur sepeda, serta pemasangan rambu-rambu keselamatan yang memadai. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan keselamatan pengguna jalan tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk mobilitas yang berkelanjutan.

Harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan beberapa provinsi yang sudah difasilitasi Ditjen Bangda dalam penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ, dimana salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Aceh, seperti yang disoroti oleh Ibu Ratih, menciptakan dasar yang kokoh untuk pelaksanaan kebijakan keselamatan lalu lintas. Namun, mencapai kesuksesan dalam implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kesesuaian aturan. Kritik konstruktif menunjukkan bahwa tantangan sebenarnya sering muncul dalam aplikasi praktis dari kebijakan tersebut, dimana kapasitas

institusi lokal, ketersediaan sumber daya, dan tingkat kepatuhan masyarakat berperan dalam menentukan efektivitas kebijakan.

Koordinasi antar-stakeholder, meskipun diakui sebagai elemen penting oleh Ibu Ratih, membawa kompleksitasnya sendiri. Proses membangun kerjasama efektif antara berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam memerlukan keterampilan negosiasi dan kemampuan untuk mencapai kompromi. Ini menunjukkan bahwa jembatan yang menghubungkan kebijakan dengan implementasinya melibatkan lebih dari sekadar keputusan administratif; ia membutuhkan dialog yang berkelanjutan dan kemampuan untuk merespons dinamika sosial-politik yang berubah.

Meskipun regulasi mungkin telah selaras, dukungan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia yang memadai merupakan faktor kunci lain yang menentukan kesuksesan implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas. Hal ini menekankan perlunya investasi berkelanjutan dalam edukasi masyarakat, pelatihan penegak hukum, dan pembangunan infrastruktur lalu lintas yang aman. Tantangan yang dihadapi di sini meliputi pengalokasian sumber daya yang strategis dan pemanfaatan teknologi serta data untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Selanjutnya, dinamika politik lokal dan nasional dapat mempengaruhi prioritas dan distribusi sumber daya untuk keselamatan lalu lintas. Ini menunjukkan bahwa upaya keselamatan lalu lintas memerlukan lebih dari sekadar keselarasan regulasi; ia membutuhkan advokasi dan komunikasi yang efektif untuk menjaga keselamatan lalu lintas sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, kejelasan komunikasi dan kemampuan untuk menavigasi perbedaan politik menjadi sangat penting.

Terakhir, menegaskan pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi dalam menjamin efektivitas dan keberlanjutan implementasi kebijakan. Dengan secara teratur menilai dampak kebijakan yang diterapkan dan mengintegrasikan pembelajaran dari proses evaluasi ke dalam siklus perencanaan selanjutnya, pemerintah dapat secara proaktif mengatasi kelemahan dan menyesuaikan strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Ini menunjukkan pendekatan yang berkelanjutan dan adaptif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas, yang mempertimbangkan perkembangan terbaru dan feedback dari masyarakat.

b. Pandangan tentang Peran Inisiatif Ditjen Bina Bangda

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) memegang peran kritis dalam menginisiasi dan memfasilitasi implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang sinergis dengan tujuan nasional, termasuk dalam konteks keselamatan lalu lintas. Melalui inisiatifnya, Ditjen Bina Bangda bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan keselamatan lalu lintas yang efektif, memastikan bahwa upaya-upaya ini selaras dengan kebijakan keselamatan lalu lintas nasional. Dengan mendorong pengintegrasian pendidikan keselamatan lalu lintas dalam kurikulum sekolah dan universitas, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih aman, Ditjen Bina Bangda berperan penting dalam menciptakan ekosistem lalu lintas yang aman dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pandangan Direktur Bina Bangda, ada pengakuan yang jelas terhadap pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan keselamatan lalu lintas. Inovasi dan inisiatif lokal dilihat sebagai kunci utama dalam menghadapi kondisi unik yang beragam di setiap wilayah. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa tidak ada solusi tunggal yang dapat diterapkan secara universal; sebaliknya, solusi yang efektif sering kali memerlukan adaptasi dan kreativitas yang bersumber dari pemahaman mendalam tentang konteks lokal.

Ditjen Bina Bangda, melalui pendekatannya, menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa pemerintah pusat memiliki peran penting dalam memberikan bantuan, baik berupa sumber daya, pelatihan, maupun bimbingan teknis, untuk memastikan bahwa inisiatif lokal dapat direalisasikan dengan efektif. Pendekatan ini juga menyoroti nilai dari kerja sama yang erat antara berbagai tingkatan pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.

Mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menerapkan solusi kreatif untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas menunjukkan pendekatan yang proaktif dan adaptif. Hal ini tidak hanya tentang menghadapi tantangan yang ada tetapi juga tentang merespons secara dinamis terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, Ditjen Bina Bangda berfungsi sebagai katalisator yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengeksplorasi dan menerapkan pendekatan baru yang bisa lebih efektif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Selain itu, perspektif ini juga menandai pengakuan terhadap pentingnya memberdayakan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Melalui pemberian kebebasan untuk berinovasi, Ditjen Bina Bangda secara efektif mengakui bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang paling mengerti kebutuhan dan tantangan spesifik yang mereka hadapi. Dengan demikian, memberikan mereka keleluasaan untuk menyesuaikan solusi merupakan langkah penting dalam mencapai efektivitas yang maksimal.

Pandangan Direktur Bina Bangda mencerminkan komitmen terhadap pendekatan kolaboratif dan inklusif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas. Melalui dukungan terhadap inovasi dan inisiatif lokal, Ditjen Bina Bangda tidak hanya berupaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatasi masalah mereka sendiri. Pendekatan ini menciptakan dasar bagi sebuah sistem keselamatan lalu lintas yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Roni, staf Ditjen Bina Bangda yang menyatakan bahwa strategi dalam mendukung inisiatif lokal untuk keselamatan lalu lintas memperlihatkan sebuah pendekatan yang mendalam dan terstruktur terhadap peningkatan keamanan di jalan. Dengan mengakui bahwa solusi inovatif dan kebijakan yang disesuaikan secara lokal memiliki peran penting, ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan implementasi kebijakan seringkali tergantung pada seberapa baik solusi tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan unik di setiap daerah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keseluruhan sistem keselamatan lalu lintas tetapi juga menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam proses peningkatan keselamatan.

Pendukung terhadap inisiatif lokal juga menandakan pengalihan dari model top-down menjadi kerja sama yang lebih kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Ini menunjukkan pengakuan atas pentingnya kepemimpinan lokal dan pengetahuan dalam merancang dan melaksanakan strategi keselamatan lalu lintas yang efektif. Model kolaboratif ini memungkinkan untuk adaptasi strategi yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan kondisi atau munculnya tantangan baru di tingkat daerah, sehingga meningkatkan agilitas dan relevansi kebijakan keselamatan lalu lintas.

Selain itu, mendorong inovasi lokal dalam keselamatan lalu lintas menciptakan peluang untuk pembelajaran dan difusi praktek terbaik antar daerah. Dengan demikian, ini tidak hanya memperkuat kapasitas individu daerah tetapi juga meningkatkan kualitas sistem keselamatan lalu lintas nasional secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Ditjen Bina Bangda berperan sebagai fasilitator dan

penghubung yang mempromosikan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, memperkuat jaringan antar daerah, dan pada akhirnya, mempercepat peningkatan keselamatan di jalan raya di seluruh Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), pandangan Kepala subdivisi menggarisbawahi peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) sebagai entitas yang bertanggung jawab menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis nasional. Peran ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa prioritas pembangunan daerah sesuai dengan arah dan tujuan strategis nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Bangda memiliki tugas untuk meningkatkan transparansi dalam perencanaan pembangunan daerah. Transparansi ini mencakup keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan. Dengan meningkatkan transparansi, Bangda berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta memastikan akuntabilitas dalam penyusunan dan implementasi kebijakan yang berfokus pada keselamatan lalu lintas.

Peran Bangda juga mencakup aspek regulasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Regulasi yang efektif dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan program keselamatan lalu lintas. Bangda bertugas untuk memastikan bahwa peraturan dan pedoman yang ada dipatuhi oleh pemerintah daerah, serta untuk mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu, Bangda bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini melibatkan pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintah daerah. Dengan kapasitas yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Konsistensi dokumen perencanaan pemerintah daerah, termasuk dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ), menjadi perhatian utama Bangda. Peran Bangda adalah memastikan bahwa dokumen perencanaan ini sejalan dengan regulasi dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku. Konsistensi ini penting untuk menjaga integritas perencanaan dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan kerangka hukum dan kebijakan nasional.

Namun, Bangda juga menghadapi tantangan dan gap dalam menjalankan perannya. Salah satu tantangan utama adalah pembinaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Gap ini dapat muncul karena perbedaan kapasitas, sumber daya, atau pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengatasi tantangan ini, Bangda perlu menerapkan pendekatan yang fleksibel dan adaptif, memberikan dukungan teknis, dan mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dalam program keselamatan lalu lintas.

Solusi yang dilakukan Bangda untuk mengatasi tantangan ini termasuk peningkatan komunikasi dan koordinasi, penyediaan sumber daya yang memadai, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Bangda juga perlu mengadopsi pendekatan berbasis bukti dalam pembinaan dan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan memiliki dasar yang kuat dan dapat diukur.

Dengan solusi ini, Bangda diharapkan dapat mengurangi gap dan tantangan yang dihadapi, serta mencapai tujuan strategis nasional dalam peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Muhammadi Lutfi, sebagai staff ahli kebijakan publik, menggarisbawahi pentingnya fasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Provinsi, yang merupakan amanat dari Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ). Respons positif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Provinsi, khususnya dalam memberikan dukungan data, mencerminkan komitmen dan kerjasama antarlembaga yang baik dalam mencapai tujuan keselamatan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antarinstansi dan pengintegrasian data yang akurat adalah kunci dalam merumuskan rencana aksi yang efektif dan terukur.

Pendekatan yang diambil oleh Lutfi menyoroti pentingnya kepemimpinan dan inisiatif dalam mendorong penyusunan dan implementasi RAK LLAJ di tingkat provinsi. Fokus pada pengumpulan dan analisis data sebagai dasar penyusunan dokumen ini menegaskan pada pentingnya membuat kebijakan yang berbasis bukti. Ini merupakan langkah strategis dalam merencanakan intervensi keselamatan lalu lintas yang tidak hanya komprehensif tetapi juga spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap provinsi. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan identifikasi masalah spesifik dan penargetan sumber daya secara lebih efisien.

Kesuksesan inisiatif seperti yang digambarkan oleh Lutfi tergantung pada kerjasama yang erat antara berbagai tingkatan pemerintah dan lembaga terkait, serta kemampuan mereka untuk berbagi dan menganalisis data secara efektif. Pengalaman ini juga menggarisbawahi perlunya mekanisme pendukung yang kuat dari pemerintah pusat, seperti Ditjen Bina Bangda, dalam memberikan arahan teknis, fasilitasi, dan monitoring yang berkelanjutan. Inisiatif ini menandai langkah penting menuju sistem keselamatan lalu lintas yang lebih integratif dan responsif terhadap tantangan keselamatan lalu lintas di Indonesia.

Nanang Suroso, seorang tenaga ahli transportasi, menekankan peranan penting pendampingan dalam upaya sinkronisasi urusan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) antara pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional, tetapi juga pada penerapannya di tingkat lokal. Suroso mengidentifikasi bahwa pendampingan ini bisa memfokuskan perhatian pemerintah daerah (pemda) terhadap pentingnya mengawal regulasi dan implementasinya dengan lebih efektif.

Keterlibatan aktif tenaga ahli seperti Suroso dalam proses sinkronisasi ini membantu memastikan bahwa pemda tidak hanya memahami regulasi yang ada tetapi juga memiliki kapasitas untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi lokal. Pendampingan ini juga membantu membangun kapasitas pemda dalam hal pengawasan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan KLLAJ, yang semuanya krusial dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Dampak dari pendampingan tersebut berpotensi besar dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan dukungan dalam implementasinya, pemda dapat lebih efektif dalam merancang dan melaksanakan program keselamatan lalu lintas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah mereka. Kerja sama dan koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah, yang difasilitasi oleh peran inisiatif dari tenaga ahli seperti Suroso, menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan keselamatan lalu lintas nasional.

Kartika Dwi Palupi, sebagai staff ahli transportasi, menyoroti dinamika respons daerah terhadap fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) yang mereka lakukan. Pendapatannya mengenai variasi respons daerah dari yang positif, pesimis, hingga apatis terhadap efek dari regulasi menunjukkan kompleksitas tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan keselamatan lalu lintas di tingkat lokal. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya memahami konteks sosial-politik setiap daerah dalam merancang dan menerapkan kebijakan publik.

Diversifikasi reaksi tersebut mencerminkan bagaimana persepsi dan prioritas lokal dapat mempengaruhi penerimaan dan implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas. Bagi daerah yang merespon positif, kegiatan fasilitasi penyusunan RAK LLAJ dapat dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan keselamatan publik dan memperkuat tata kelola. Sementara itu, sikap pesimis atau apatis mungkin berasal dari keraguan terhadap efektivitas regulasi, keterbatasan sumber daya, atau kelelahan regulasi yang dirasakan oleh pemangku kepentingan lokal.

Analisis situasi ini menggarisbawahi pentingnya strategi komunikasi dan pendekatan yang disesuaikan untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen daerah terhadap kebijakan keselamatan lalu lintas. Kartika Dwi Palupi dan timnya perlu mengembangkan mekanisme pendukung dan insentif untuk memotivasi daerah yang pesimis atau tidak peduli, serta memperkuat kerjasama dengan daerah yang sudah merespon positif. Upaya ini dapat mencakup penyediaan sumber daya, pelatihan, dan pembagian praktik terbaik untuk mengatasi hambatan dan memperkuat kapasitas daerah dalam mengimplementasikan RAK LLAJ secara efektif.

Antonio Araujo Fernandes dari Provinsi NTT menyoroti peran vital Ditjen Bina Bangda dalam memberikan dukungan teknis dan panduan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen dan rencana aksi keselamatan lalu lintas. Ini menandai langkah penting dalam mengintegrasikan upaya keselamatan lalu lintas secara nasional dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh daerah. Namun, analisis ini mengundang pertanyaan kritis mengenai sejauh mana panduan dan dukungan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan unik setiap daerah, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan infrastrukural yang signifikan seperti NTT serta perilaku masyarakat yang sulit untuk dirubah.

Dukungan Ditjen Bina Bangda dalam penyusunan dokumen keselamatan lalu lintas jalan memberikan kerangka kerja bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan strategi keselamatan. Namun, kritik yang dapat muncul adalah apakah pendekatan "satu ukuran untuk semua" cukup efektif dalam menangani keanekaragaman kondisi di berbagai daerah. Keunikan NTT, misalnya, mungkin memerlukan strategi yang lebih disesuaikan, yang mengakomodir kondisi lokal seperti topografi yang berbukit dan infrastruktur yang belum merata.

Lebih lanjut, mendorong pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi keselamatan sendiri adalah inisiatif yang positif, namun tantangannya adalah dalam penerapan dan pemantauan efektivitas rencana tersebut. Apakah ada mekanisme feedback dan evaluasi yang memadai untuk menjamin bahwa rencana aksi tersebut tidak hanya disusun tetapi juga diterapkan dengan cara yang menghasilkan peningkatan nyata dalam keselamatan lalu lintas? Kritik ini mengarah pada pentingnya Ditjen Bina Bangda tidak hanya sebagai fasilitator dalam penyusunan dokumen tetapi juga sebagai mitra aktif dalam implementasi dan evaluasi.

Meskipun dukungan Ditjen Bina Bangda sangat diperlukan, kemandirian dan inisiatif lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan jangka panjang upaya keselamatan lalu lintas. Keterlibatan

masyarakat lokal, pemahaman mendalam tentang perilaku pengguna jalan, dan adaptasi strategi berdasarkan feedback lokal adalah aspek-aspek yang dapat meningkatkan efektivitas rencana aksi keselamatan. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara Ditjen Bina Bangda dengan pemerintah daerah harus diperkuat dengan pertukaran pengetahuan yang berkelanjutan dan pemberdayaan daerah untuk mengambil tindakan inovatif sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri telah memainkan peran kunci dalam penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat, industri transportasi, dan komunitas masyarakat transportasi di daerah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Melalui penguatan peran ini, Ditjen Bina Bangda telah membantu dalam mengidentifikasi dan menutup kesenjangan dalam mengimplementasikan kebijakan, meningkatkan kerjasama antarlembaga, peningkatan kualitas SDM dan pembagian pengetahuan dan praktik terbaik antara pemerintah daerah. Penguatan peran Ditjen Bina Bangda juga mencakup inisiasi terhadap pelaksanaan program Rencana Aksi Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) yang merupakan amanat Perpres No 1 Tahun 2022 tentang RUNK dan didukung oleh sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas yang bertujuan untuk menyesuaikan implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas dengan konteks dan kebutuhan spesifik daerah; b) Strategi yang diadopsi oleh Ditjen Bina Bangda dalam mendorong pelaksanaan yang lebih efektif dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mencakup beberapa elemen kunci. *Pertama*, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara semua tingkatan pemerintahan dan stakeholders melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur. *Kedua*, pemberdayaan pemerintah daerah melalui transfer pengetahuan, pembangunan kapasitas, dan dukungan teknis untuk memperkuat implementasi kebijakan dan program keselamatan lalu lintas secara lokal. *Ketiga*, mendorong inovasi dan adaptasi kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti, dimana data dan analisis digunakan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan kebijakan dan praktik sesuai dengan dinamika dan tantangan lokal. *Keempat*, meningkatkan partisipasi publik dan pengawasan masyarakat dalam upaya keselamatan lalu lintas untuk memastikan bahwa kebijakan dan program keselamatan lalu lintas mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Secara umum, Ditjen Bina Bangda telah memainkan peran vital dalam memperkuat koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi RUNK LLAJ, dengan strategi yang berfokus pada pemberdayaan pemerintah daerah, pendekatan berbasis bukti, dan peningkatan partisipasi publik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan lalu lintas yang lebih aman, responsif, dan inklusif di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akkermans, Bram, 'Public Policy (Orde Public)', *European Property Law Journal*, 8.3 (2020), 260–300
<<https://doi.org/10.1515/eplj-2019-0015>>
- Crabbe, Erika L., Allyn Benintendi, David K. Jones, Alexander Y. Walley, Jacqueline Milton Hicks, and Mari Lynn Drainoni, 'Translating Medicaid Policy into Practice: Policy Implementation Strategies from Three US States' Experiences Enhancing Substance Use Disorder Treatment', *Implementation*

- Science, 17.1 (2022), 1-15 <<https://doi.org/10.1186/s13012-021-01182-4>>
- Davies, Huw, 'Exploring the Impact of Policy on Road Transport in 2050 Opportunities to Accelerate Reduction in Carbon Emissions', *Johnson Matthey Technology Review*, 64.3 (2020), 252-62 <<https://doi.org/10.1595/205651320x15816871073928>>
- Djajasinga, Nico, Djamal Subastian, Annisa Aliefdea, and Kastur Riestamy, 'Safety Road Improvement on Kedu-Parakan Street , Temanggung Regency Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Research Article', 12.12 (2021), 2832-42
- Donald Van Meter, Van Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Dalam Administration and Society* 6 (London: Sage Publication, 1995)
- Dunn, William, *Analisis Kebijakan Publik* (Jakarta: Karya Salemba Empat, 1999)
- Farooq, Danish, Sarbast Moslem, Arshad Jamal, Farhan Muhammad Butt, Yahya Almarhabi, Rana Faisal Tufail, and others, 'Assessment of Significant Factors Affecting Frequent Lane-Changing Related to Road Safety: An Integrated Approach of the Ahp-Bwm Model', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18.20 (2021), 1-18 <<https://doi.org/10.3390/ijerph182010628>>
- Grindle, Marilee, *Politics and Policy Implementation in The Third World* (New Jersey: Princeton University Press, 1980)
- Grindle, Merilee S., *Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton* (New Jersey: Princeton University Press, 1980)
- Hazelkorn, Ellen, and Andrew Gibson, 'Public Goods and Public Policy: What Is Public Good, and Who and What Decides?', *Higher Education*, 78.2 (2019), 257-71 <<https://doi.org/10.1007/s10734-018-0341-3>>
- Hiktaop, K., A. S. Ulita, W. Meilvidiri, M. V.I. Herdjiono, and P. P. Hayon, 'Influence of Fiscal Decentralization on the Economic Growth of Public Welfare and Poverty between Regions of Province of Papua', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 473.1 (2020), 1-8 <<https://doi.org/10.1088/1755-1315/473/1/012030>>
- Jamal, Abd, Muhammad Nasir, Putri Bintusy Syathi, and Fitriyani, 'Developing Village in the Former Conflict Region of Indonesia through Social and Economic Inclusion: Evidence from Aceh', *Cogent Social Sciences*, 9.1 (2023), 1-17 <<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2178521>>
- Jati, D. S., 'Pengelolaan Program Keselamatan Transportasi Jalan Di Jalur Pantura Pekalongan', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 4.1 (2010), 49-58. <<https://doi.org/10.14710/politika.4.1.2013.49-58>>
- Korenik, Dorota, and Maria Wegrzyn, 'Public Policy Timing in a Sustainable Approach to Shaping Public Policy', *Sustainability (Switzerland)*, 12.7 (2020) <<https://doi.org/10.3390/su12072677>>
- Lane, Cassandra, Patti Jean Naylor, Adam Shoemsmith, Luke Wolfenden, Alix Hall, Rachel Sutherland, and others, 'Identifying Essential Implementation Strategies: A Mixed Methods Process Evaluation of a Multi-Strategy Policy Implementation Intervention for Schools', *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 19.1 (2022), 1-23 <<https://doi.org/10.1186/s12966-022-01281-5>>
- Luo, Xichun, and Honghao Zhao, 'Promotion Strategy of Policy against Food Waste (PAFW): The Perspective on Evolutionary Game between Local Government and Large Supermarkets', *Complexity*, 2021 (2021) <<https://doi.org/10.1155/2021/6567902>>
- Martati, Indah, Besse Asniwati, and Suminto, 'The Impact of Regional Income to Welfare of Regencies

- and Cities Community in East Kalimantan Indonesia', *Academy of Entrepreneurship Journal*, 26.1 (2020), 1-10
- Mo, Fei, and Derek Wang, 'Environmental Sustainability of Road Transport in OECD Countries', *Energies*, 12.18 (2019) <<https://doi.org/10.3390/en12183525>>
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2018)
- Nayak, Bhabani Shankar, 'Reconceptualising Public Private Partnerships (PPPs) in Global Public Policy', *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 15.3 (2019), 259-66 <<https://doi.org/10.1108/WJEMSD-04-2018-0041>>
- Olin, Janne J., and Miloš N. Mladenović, 'Imaginarities of Road Transport Automation in Finnish Governance Culture—A Critical Discourse Analysis', *Sustainability (Switzerland)*, 14.3 (2022) <<https://doi.org/10.3390/su14031437>>
- Paulauskas, Vytautas, Lawrence Henesey, Birute Plačiene, Martynas Jonkus, Donatas Paulauskas, Raimondas Barzdžiukas, and others, 'Optimizing Transportation between Sea Ports and Regions by Road Transport and Rail and Inland Waterway Transport Means Including "Last Mile" Solutions', *Applied Sciences (Switzerland)*, 12.20 (2022) <<https://doi.org/10.3390/app122010652>>
- Pérez, K., M. Mari-Dell'Olmo, A. Tobias, and C. Borrell, 'Reducing Road Traffic Injuries: Effectiveness of Speed Cameras in an Urban Setting', *American Journal of Public Health*, 97.9 (2011), 1632-1637.
- Pichler, Franz, Wija Oortwijn, Alric Ruether, and Rebecca Trowman, 'Defining Capacity Building in the Context of HTA: A Proposal by the HTAi Scientific Development and Capacity Building Committee', *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 35.5 (2019), 362-66 <<https://doi.org/10.1017/S0266462319000631>>
- Rosolino, V., I. Teresa, A. Vittorio, F. D. Carmine, T. Antonio, R. Daniele, and others, 'Road Safety Performance Assessment: A New Road Network Risk Index for Info Mobility', *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 111 (2014), 624-33 <<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.096>>
- Rúa, Erik, Lino Comesaña-Cebral, Pedro Arias, and Joaquín Martínez-Sánchez, 'A Top-down Approach for a Multi-Scale Identification of Risk Areas in Infrastructures: Particularization in a Case Study on Road Safety', *European Transport Research Review*, 14.1 (2022) <<https://doi.org/10.1186/s12544-022-00563-0>>
- Saefuloh, Aef, Universitas Pasundan Bandung, H Bambang Heru, and Universitas Pasundan Bandung, 'POLICY IMPLEMENTATION STRATEGY A DECADE', 21.3 (2022), 1-9
- Santos-Reyes, Jaime, Diego Padilla-Perez, and Alan N. Beard, 'Transport Infrastructure Interdependency: Metro's Failure Propagation in the Road Transport System in Mexico City', *Sustainability (Switzerland)*, 11.17 (2019) <<https://doi.org/10.3390/su11174757>>
- Shuey, R., 'Road Safety Policy & Practice', *Journal of the Australasian College of Road Safety*, 30.1 (2019), 58
- Soerjono Soekonto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015)
- Sudarmawan, Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Suresh, Subashini, Suresh Renukappa, Abdul Rashid Abdul-Aziz, Yogeswary Paloo, and Haddy Jallow, 'Developments in the UK Road Transport from a Smart Cities Perspective', *Engineering, Construction and Architectural Management*, 28.4 (2020), 845-62 <<https://doi.org/10.1108/ECAM-12-2019-0687>>
- Wiryan, Bangkit A., and Christian Otchia, 'The Legacy of the Reformasi: The Role of Local

Government Spending on Industrial Development in a Decentralized Indonesia', *Journal of Economic Structures*, 11.1 (2022) <<https://doi.org/10.1186/s40008-022-00262-y>>
Zhu, S., J. Lu, and G. Wang, 'Intersection Safety Evaluation Model', in *Seventh International Conference on Traffic and Transportation Studies (ICTTS) 2010*, 2010, pp. 305-11